



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARMUJI
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 37552

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **25.444.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 2.944.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **197.200.000**



1. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
197.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	459.177.019
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	26.100.377.019
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.100.377.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.